

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sapi potong merupakan salah satu komoditas peternakan unggulan dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia. Namun, populasi sapi potong di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 17,6 juta ekor (BPS, 2022). Jumlah ini masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi potong di Indonesia karena masih mengimpor daging sapi potong hingga 20-30% dari kebutuhan setiap tahun dan prioritas utama peternakan sapi potong di Indonesia saat ini lebih difokuskan untuk memenuhi pasar dan kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Selain itu, tingkat kematian sapi potong akibat pemeliharaannya di Indonesia sangat tinggi berkisar 7-10% setiap tahun. Keberhasilan jumlah sapi potong sangat tergantung pada pemeliharaannya.

Kesehatan ternak merupakan salah satu aspek pemeliharaan yang berpengaruh dalam keberhasilan usaha peternakan. Kesehatan ternak harus selalu diperhatikan untuk mengurangi kerugian akibat penyakit pada ternak. Kesehatan ternak mempunyai dampak negatif seperti produktivitas ternak menurun, pertumbuhan ekonomi peternak terhambat, kualitas dan keamanan pangan hewani menurun, penyakit menular ke manusia, serta kerugian ekonomi. Kerugian ini menunjukkan bahwa kesehatan ternak penting dalam peternakan.

Ancaman yang sangat merugikan bagi peternak usaha sapi potong adalah munculnya penyakit. Salah satu penyakit yang sangat serius bagi peternak sapi potong adalah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Penyakit ini memiliki morbiditas tinggi dan mortalitas rendah, meskipun tingkat mortalitas tinggi terjadi pada hewan

muda (Rushton dan Knight Jones, 2013). Penyakit ini jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, dan penularan virus yang sangat cepat antar ternak, serta pembatasan perdagangan ternak daerah yang terkena wabah PMK.

Penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah infeksi virus akut dan sangat menular yang menyerang hewan berkuku belah. Penyakit ini ditandai dengan terbentuknya lepuh atau vesikel dan erosi pada kulit sekitar mulut, lidah, gusi, lubang hidung, puting susu, dan kuku. Nama lain penyakit ini antara lain *Aphthae Epizotica* (AE), *Aphthous Fever*, *Foot and Mouth Disease* (FMD). Penyakit ini menyebar melalui berbagai cara, yaitu kontak langsung antara hewan yang tidak terinfeksi dan hewan yang sakit, kontak tidak langsung, dan melalui penularan melalui udara. Ada kemungkinan virus menyebar melalui droplet, sekret hidung, kotoran, kulit, angin, makanan yang terkontaminasi, dan manusia. Masa inkubasinya berkisar antara 1 hingga 14 hari, sejak hewan tertular hingga muncul gejala penyakit.

Di Indonesia, PMK pertama kali ditemukan pada tahun 1887 di Malang, Jawa Timur melalui impor sapi dari Belanda. Wabah PMK terakhir terjadi di pulau Jawa pada tahun 1983 yang kemudian dapat diberantas melalui program vaksinasi massal. Indonesia dinyatakan sebagai negara bebas PMK pada tahun 1986 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No.260/1986 dan kemudian diakui oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pada tahun 1990 dengan Resolusi No XI, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE/ *Office des Internationale Epizootis*) telah menambahkan penyakit mulut dan kuku masuk ke dalam daftar penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang harus segera dilaporkan.

PMK kembali masuk ke Indonesia pada April 2022. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403 Tahun 2022 menetapkan beberapa daerah di Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan sebagai daerah wabah PMK pada 28 April 2022. Provinsi Aceh juga ditetapkan sebagai daerah wabah PMK tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404 Tahun 2022 pada 11 Mei 2022. Menurut Disnakkeswan Provinsi Jawa Tengah (2023), penyebaran wabah PMK di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 613.567 ekor ternak yang tersebar di 27 provinsi dan 314 kabupaten atau kota dengan jumlah ternak yang sembuh karena terinfeksi PMK sebanyak 581.046 ekor, jumlah ternak mati dan dipotong bersyarat sebanyak 25.682 ekor.

Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat sejak bulan Mei hingga bulan Agustus 2022 sebanyak 19.753 ekor ternak yang terpapar PMK dengan jumlah ternak yang sembuh karena terinfeksi PMK sebanyak 9.505 ekor, jumlah ternak mati sebanyak 35 ekor, ternak dipotong bersyarat sebanyak 61 ekor. (Disnakkeswan Provinsi Sumatra Barat, 2022). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) menetapkan Provinsi Sumatera Barat masuk ke dalam zona merah untuk kasus PMK. Kota Padang juga menjadi salah satu kabupaten atau kota yang terdampak PMK. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kota Padang, Kota Padang tercatat memiliki kasus 85 ekor terpapar PMK pada tahun 2022 dengan angka kematian 3 ekor ternak. Persentase Angka kematian dan ternak potong bersyarat di Kota Padang sangat rendah. Hal ini karena masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang jika ternak mereka menunjukkan gejala Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dengan adanya laporan tersebut, ternak yang

terinfeksi PMK dapat segera ditangani, sehingga kasus kematian ternak menjadi jarang terjadi.

Salah satu strategi utama yang diterapkan dalam pengendalian PMK adalah melaksanakan vaksinasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. Vaksinasi adalah upaya pemberian vaksin yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit. Sebelum dilaksanakan vaksinasi diperlukan persiapan dengan mengidentifikasi wilayah sasaran, koordinasi dan sosialisasi lembaga daerah di tingkat provinsi, daerah, dan kota yang melaksanakan tindakan vaksinasi guna meningkatkan pemahaman dan mengoptimalkan pelaksanaan tindakan. Sosialisasi dilakukan baik melalui pembina di tingkat pusat bagi lembaga daerah di tingkat provinsi maupun melalui lembaga di tingkat provinsi, daerah, dan kota sebagai pendamping penerima manfaat. Vaksinasi yang digunakan yaitu jenis vaksin *inactive* yang memiliki kesesuaian dengan *serotipe* virus PMK di Indonesia dan dalam pelaksanaannya harus mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Otoritas Veteriner Nasional. Pendanaan dalam Program Vaksinasi PMK diberikan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran untuk Program Vaksinasi PMK secara nasional pada tahun 2022 sebesar Rp 4,6 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp15,4 triliun.

Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan program vaksinasi PMK secara rutin dan berkala sejak bulan Juli tahun 2022 sampai bulan Desember tahun 2023. Calon penerima program vaksinasi adalah peternak, kelompok tani, UPT, UPTD,

dan kriteria calon lokasi program vaksinasi penyakit mulut dan mulut adalah: a) Wilayah kejadian penyakit hewan berdasarkan laporan pemerintah daerah Provinsi / Kabupaten / Kota, dan UPT yang ditunjuk bertanggung jawab melaksanakan tugas veteriner dalam aplikasi pelaporan b). Tempat yang berpotensi masuknya penyakit mulut dan kuku dan/atau c). Lokasi yang diperuntukkan bagi pemberantasan PMK. Jenis obat hewan untuk program vaksinasi PMK antara lain vaksin, vitamin, antibiotik, antipiretik, analgetik, antihistamin, anti inflamasi, suplemen energi (ATP) dan desinfektan dengan spesifikasi yang memiliki nomor registrasi obat hewan yang valid dari Kementerian Pertanian. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh dokter hewan dan petugas kesehatan di bawah pengawasan dokter hewan.

Pemerintah Kota Padang mendapatkan bantuan 9.000 dosis vaksin PMK dari pemerintah pusat. Vaksinasi PMK ini diberikan dalam 3 tahap atau pengulangan yakni jarak antara vaksinasi tahap I dengan tahap II yaitu satu bulan, sedangkan jarak vaksinasi tahap II dengan vaksinasi tahap III yaitu 6 bulan setelah vaksinasi tahap II. Jenis vaksin yang digunakan dalam penanggulangan PMK yaitu Aftofor, CAVac FMD, dan Aftosa dengan dosis 2ml untuk masing-masing ternak. Terdapat 11 Kecamatan yang mengikuti program vaksinasi di Kota Padang. Pada tahun 2022 peternak yang sapinya mengikuti program vaksinasi PMK berjumlah 3.479 ekor dan tahun 2023 peternak yang sapinya mengikuti program vaksinasi PMK berjumlah 3.416 ekor.

Tabel 1. Rekapitulasi Vaksinasi PMK tahun 2022 dan 2023 di Kota Padang

No.	Kecamatan	Jumlah Sapi yang Mengikuti Program Vaksinasi PMK (ekor)		Total
		2022	2023	
1	Bungus Teluk Kabung	458	81	539
2	Lubuk Kilangan	55	237	292
3	Lubuk Begalung	206	478	684
4	Padang Selatan	28	37	65
5	Padang Timur	112	71	183
6	Padang Barat	0	25	25
7	Padang Utara	32	1	33
8	Nanggalo	132	190	322
9	Kuranji	580	452	1.032
10	Pauh	626	1.395	2.021
11	Koto Tangah	1.250	449	1.699
	Total	3.479	3.416	6.895

Sumber: Dinas Pertanian Kota Padang, 2024

Evaluasi perlu dilakukan setelah terlaksananya program vaksinasi PMK di Kota Padang secara rutin dan berkala selama 2 tahun pada sapi potong. Evaluasi pelaksanaan program vaksinasi PMK bertujuan untuk mengetahui dengan tepat pelaksanaan kegiatan serta tantangan yang ada. Selain itu, untuk menilai sejauh mana program vaksinasi PMK yang dilakukan memberikan *input*, *output*, dan *outcome*. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana program vaksinasi PMK ini memberikan *benefit* dan dampak terhadap peningkatan populasi sapi. Keberhasilan pelaksanaan suatu program dapat diukur berdasarkan indikator kinerja dari 5 unsur pengukuran antara lain evaluasi terhadap *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan dampak (Sjafrizal, 2014). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Evaluasi Dampak Program Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku Terhadap Populasi Sapi Potong Peternak Terdampak di Kota Padang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana realisasi *input*, *output*, dan *outcome* dari Program Vaksinasi PMK terhadap peternak terdampak di Kota Padang?
2. Sejauh mana *benefit* dan dampak dari Program Vaksinasi PMK terhadap peternak terdampak di Kota Padang?
3. Mengevaluasi perbedaan jumlah populasi sapi potong peternak terdampak sebelum dan sesudah program vaksinasi PMK?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengevaluasi realisasi *input*, *output*, dan *outcome* dari Program Vaksinasi PMK terhadap peternak terdampak di Kota Padang.
2. Mengevaluasi *benefit* dan dampak dari Program Vaksinasi PMK terhadap peternak terdampak di Kota Padang.
3. Mengevaluasi perbedaan jumlah populasi sapi potong peternak terdampak sebelum dan sesudah program vaksinasi PMK.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian sejenis di masa mendatang.
2. Meningkatkan kesadaran peternak akan pentingnya vaksinasi dalam usaha peternakan.

3. Memberikan evaluasi mengenai efektivitas program vaksinasi PMK sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan penanggulangan.

